

KOMUNIKASI MULTIKULTURAL PADA PRAKTIK PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2024)

Nurawaliah Ramadhani¹, Alamsyah¹, Suci Emelsi Jeffri¹

¹Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia

Received: 16/05/2026	Revised: 24/06/2026	Accepted: 30/07/2026
Abstract	This study aims to analyze the forms of multicultural communication implemented by the General Election Commission (KPU) of Tangerang Regency in the 2024 General Election socialization, identify community responses to its effectiveness, and map the obstacles encountered in a region with high ethnic and cultural diversity. Using a qualitative approach with a case study method, this research examines how adaptive communication strategies are employed to reach a heterogeneous society amidst challenges such as political literacy and potential polarization. The findings reveal that KPU implemented communication patterns capable of bridging differences in voters' cultural backgrounds through convergence strategies such as local language adjustments, interpersonal approaches, and segmenting communication media to increase public participation and maintain social stability during the democratic process, while utilizing divergence selectively for administrative clarity. Practically, this study serves as an evaluation for election organizers in designing more inclusive socialization models based on local wisdom in the future.	
Keywords	Multicultural Communication, Election Socialization, KPU Tangerang Regency.	
Corresponding Author Nurawaliah Ramadhani Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia; 2201030096@students.unis.ac.id		

1. PENDAHULUAN

Pada konteks masyarakat Indonesia, variasi yang ada menyulitkan komunikasi karena adanya perbedaan dalam bahasa, agama, tradisi, dan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi, dengan lebih dari 700 bahasa yang dipakai di seluruh daerah (Salahuddin, 2024). Pada masyarakat multikultural, praktik komunikasi menuntut kemampuan komunikator untuk mengadaptasi bahasa, simbol, dan medium komunikasi agar selaras dengan nilai-nilai lokal. Tujuannya adalah informasi yang disampaikan dapat dimengerti secara utuh tanpa menimbulkan distorsi informasi. Komunikasi multikultural juga merupakan proses penyampaian informasi, pesan, dan simbol yang mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, agama, nilai, dan gaya komunikasi dari kelompok



masyarakat yang beragam, dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama, meningkatkan partisipasi, serta menjaga kohesi (Salahuddin, 2024).

Komunikasi multikultural memungkinkan individu dan kelompok untuk memahami serta menghargai perbedaan budaya, agar menciptakan hubungan yang seimbang dan efisien. Komunikasi multikultural memiliki ciri-ciri utama yang membedakannya dari komunikasi pada umumnya, yaitu bersifat inklusif, sensitif terhadap perbedaan budaya, dan adaptif terhadap berbagai nilai, bahasa, serta simbol yang digunakan oleh beragam kelompok masyarakat. Komunikasi ini tidak bersifat satu arah, melainkan mempertimbangkan latar belakang etnis, agama, dan budaya audiens agar pesan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Selain itu, komunikasi multikultural juga melibatkan tokoh masyarakat lokal atau pemimpin informal untuk menjembatani pesan agar mudah dipahami (Nurhidayah et al., 2022).

Komunikasi multikultural di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam ruang publik. Dalam masyarakat multikultural, simbol, bahasa, gaya komunikasi memiliki makna yang tidak selalu universal (Mamis et al., 2025). Pesan yang berhasil untuk satu komunitas mungkin dianggap tidak penting atau bahkan menyinggung bagi komunitas lain. Oleh karena itu, sensitivitas budaya multikultural ini menjadi elemen terpenting dalam praktik komunikasi agar pesan-pesan publiknya diterima positif oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu multikultural dalam konteks sosial dilandaskan pada interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pendidikan multikultural mendorong kita untuk belajar melalui interaksi lintas budaya, yang membantu mereka memahami perbedaan yang ada. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi, baik dari segi etnis, agama, bahasa, tradisi, maupun warisan budayanya (Mamis et al., 2025). Keberagaman ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang hidup dalam kerangka Multikulturalisme, yakni pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya yang ada dalam suatu kesatuan bangsa. Dalam membangun identitas sebuah negara diperlukan peranan penting dari multikulturalisme. Multikulturalisme menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun negara, sehingga masyarakat merasa dirinya dihargai tanpa melihat perbedaan yang multikultural. Definisi dari multikulturalisme juga beragam. Identitas bangsa merupakan kesadaran yang menghubungkan individu-individu dari berbagai budaya, etnis, dan agama yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa identitas nasional lebih dari sekedar simbol atau atribut negara (Melsya Firtikasari, 2024).

Praktik komunikasi multikultural menemukan momentum krusialnya dalam ranah komunikasi politik, khususnya melalui agenda sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai instrumen utama kedaulatan rakyat, Pemilu bukan sekadar mekanisme teknis pemungutan suara, melainkan sebuah proses penyebaran informasi masif yang memerlukan keterlibatan langsung dari berbagai lapisan

masyarakat. Dalam situasi ini, keberhasilan sosialisasi KPU menjadi tolok ukur utama dalam komunikasi politik multikultural. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk merancang strategi sosialisasi yang inklusif dan adaptif, sehingga pesan mengenai hak pilih, profil kandidat, hingga tahapan pemilu dapat menembus sekat-sekat perbedaan budaya dan agama. Pendekatan sosialisasi yang sensitif terhadap nilai lokal, membuat KPU tidak hanya berupaya meningkatkan literasi politik pemilih, tetapi juga memastikan pesan demokrasi tersampaikan tanpa menimbulkan distorsi informasi atau ketegangan sosial di tengah masyarakat yang heterogen.

Keberhasilan Pemilu sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara dalam menerjemahkan nilai-nilai demokrasi universal ke dalam konteks lokal yang beragam. Praktik komunikasi politik multikultural dalam Pemilu bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama di tengah perbedaan kepentingan (Kartiko, 2025). Melalui pendekatan yang adaptif seperti penggunaan bahasa daerah dalam sosialisasi atau pelibatan tokoh adat KPU dapat membangun legitimasi proses demokrasi dan memperkuat kohesi sosial. Komunikasi politik multikultural menjadi prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan mampu mencerminkan representasi rakyat Indonesia yang sesungguhnya.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memegang peranan sentral sebagai komunikator utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga yang independen, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam masyarakat yang plural, KPU harus merancang komunikasi nasional yang mampu menjangkau jutaan pemilih dengan latar belakang sosiokultural yang beragam. Hal ini dilakukan agar setiap warga negara mendapatkan akses informasi yang setara mengenai hak-hak politik mereka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara wajib mengelola interaksi sosial secara dua arah guna meminimalisir kesalahpahaman interpretasi pesan politik. Tanpa komunikasi yang tepat, keberagaman dapat menjadi celah bagi munculnya politik identitas yang mampu memecah belah persatuan bangsa.

Salah satu lembaga penyelenggara pemilu dengan masyarakat multikultural yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, KPU berperan penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan transparan, adil, dan inklusif. Kabupaten Tangerang memiliki wilayah dengan populasi multikultural yang mencakup berbagai etnis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi (Gunawan, 2024). Dengan jumlah penduduk yang besar dan latar belakang etnis yang beragam seperti masyarakat asli Banten, Betawi, Jawa, Sunda, Tionghoa, serta pendatang dari berbagai daerah lain.

Keberagaman ini terlihat dalam berbagai elemen kehidupan, mulai dari bahasa, tradisi, sampai dengan ritual keagamaan.. Misalnya, dalam hal agama, mayoritas penduduk Kabupaten Tangerang beragama Islam, namun terdapat pula pemeluk agama Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain

keberagaman etnis dan agama, latar belakang sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang juga beragam. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa, mengingat letaknya yang dekat dengan ibu kota Jakarta. Namun, terdapat pula masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan, terutama di daerah pesisir (Tangerang, 2024).

Sebagai salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki keragaman demografis yang bergaris tegas etnis, agama, budaya lokal, dan kelompok kepercayaan. Hal ini menunjukkan keberagaman agama dan kepercayaan. Selain itu, jumlah tempat ibadah di Kabupaten Tangerang yang sangat banyak dan tersebar menunjukkan pluralitas keyakinan yang nyata. Kabupaten Tangerang mencakup 29 kecamatan, 246 desa, dan 28 kelurahan, serta jumlah pemilih tetap (DPT) mencapai 2.369.021 orang pada Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pemilu di 4.484 tempat pemungutan suara (TPS) (Tangerang, 2024).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi, KPU Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai program sosialisasi. Upaya ini mencakup penggunaan media digital, pemanfaatan media massa nasional, serta pendekatan tatap muka dengan tokoh agama dan komunitas adat. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan literasi politik dan memastikan informasi tahapan pemilu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif komunikasi politik multikultural, sosialisasi yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Tangerang menuntut adanya sensitivitas terhadap keberagaman latar belakang pemilih. KPU harus mengadaptasi pesan-pesan politik ke dalam simbol, bahasa, dan nilai lokal agar informasi tersebut relevan bagi masyarakat asli maupun pendatang. Praktik komunikasi ini tidak hanya bersifat penyampaian informasi satu arah, tetapi juga harus menciptakan ruang dialog yang inklusif bagi kelompok minoritas. Dengan ini, KPU berupaya membangun kepercayaan publik dan meminimalisir potensi gesekan sosial akibat perbedaan identitas di tengah masyarakat.

KPU Kabupaten Tangerang juga mengoptimalkan peran tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi dalam lingkungan yang heterogen. Para tokoh agama dan pemuka adat membantu menerjemahkan regulasi pemilu yang teknis menjadi bahasa sosial yang lebih mudah diterima oleh warga. Praktik komunikasi politik multikultural ini menjadi instrumen penting untuk menjamin hak politik setiap individu tanpa memandang sekat-sekat etnisitas. Keberhasilan sosialisasi di Kabupaten Tangerang sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara dalam mengelola dinamika budaya melalui interaksi sosial yang komunikatif dan persuasif.

Fenomena di lapangan menunjukkan adanya perbedaan partisipasi pemilih yang cukup signifikan meskipun KPU Kabupaten Tangerang telah menjalankan berbagai sosialisasi. Data mencatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat mengalami fluktuasi yang tajam antara pemilihan nasional dan pemilihan lokal di wilayah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang mencatat tingkat partisipasi

pemilih sebesar 67 % dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.590.657 jiwa pada Pilkada serentak 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada usaha sosialisasi, hampir sepertiga pemilih tetap tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di Kabupaten Tangerang mencapai 80,44 % dari DPT sebanyak 2.118.565 orang. Data ini penting sebagai titik banding untuk melihat perubahan partisipasi dalam pemilu atau pilkada berikutnya. Data ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Perbandingan Partisipan Masyarakat

Jenis Pemilu	Wilayah	Partisipasi Pemilih (%)
Pemilu Nasional 2024	Nasional	± 81,78%
Pilkada Kabupaten Tangerang 2024	Lokal	± 67%
Pemilu Nasional 2019	Kabupaten Tangerang	± 80,44%

Sumber: Data KPU Kabupaten Tangerang 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa hampir sepertiga pemilih di Kabupaten Tangerang tidak menggunakan hak pilihnya pada tingkat lokal. Kesenjangan partisipasi ini mengindikasikan bahwa pesan komunikasi politik di tingkat daerah belum sepenuhnya mampu membangun keterikatan emosional dengan masyarakat yang multikultural. Kondisi ini menuntut KPU Kabupaten Tangerang untuk mengevaluasi kembali efektivitas komunikasi politiknya agar tetap relevan di tengah keberagaman latar belakang pemilih (Tangerang, 2024).

Sebagai wilayah multikultural Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan dalam menjangkau semua kelompok masyarakat secara efektif. Dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, komunikasi politik tidak bisa dilakukan dengan pendekatan tunggal. Tiap kelompok masyarakat memiliki preferensi simbolik, gaya komunikasi, dan kanal informasi yang berbeda. Oleh karena itu, pesan-pesan politik yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum harus mempertimbangkan konteks budaya lokal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Fenomena multikulturalisme di Kabupaten Tangerang menghadirkan tantangan bagi KPU, terutama dalam merancang strategi sosialisasi yang mampu menembus sekat-sekat perbedaan. KPU dituntut memiliki kompetensi komunikasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosiologis, agar pesan pemilu dapat diterima oleh kelompok etnis dan agama yang beragam tanpa ada yang merasa dibedakan. Namun, dalam praktiknya, muncul sebuah fenomena yang menjadi tantangan seperti, kesenjangan literasi digital di tengah dorongan digitalisasi pemilu. Meskipun KPU gencar melakukan sosialisasi melalui kanal digital (media sosial, aplikasi, dan situs web), sebagian besar masyarakat di wilayah atau kelompok ekonomi tertentu di Kabupaten Tangerang belum mampu mengakses informasi tersebut secara optimal. Fenomena ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan sebuah "digital divide" yang memaksa KPU untuk melakukan perubahan strategi. KPU terpaksa

kembali mengandalkan saluran komunikasi tradisional seperti pertemuan tatap muka dan forum warga guna memastikan informasi tahapan pemilu tidak terputus.

Ketegangan antara pendekatan sosialisasi modern (digital) dengan realitas kemampuan masyarakat ini menunjukkan bahwa aspek multikultural di Kabupaten Tangerang mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu perbedaan akses dan pemahaman media. Literasi digital dan strategi sosialisasi multikanal menjadi krusial, sosialisasi tidak bisa lagi diseragamkan, melainkan harus berdasarkan profil digital tiap kelompok masyarakat demi mewujudkan partisipasi yang inklusif. Selain kendala akses, fenomena sosialisasi KPU juga dibayangi oleh potensi gesekan politik identitas. Dalam masyarakat yang beragam, narasi sosialisasi yang kurang hati-hati dapat disalahtafsirkan sebagai keberpihakan, yang berpotensi memicu konflik antar-kelompok. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan untuk mengemas pesan sosialisasi yang netral namun tetap persuasif, guna membendung narasi-narasi yang sering muncul di ruang publik.

Selanjutnya, muncul fenomena apatisisme pemilih sebagai respons terhadap kejenuhan politik. Terutama di kalangan generasi muda dan kelompok marjinal, sosialisasi sering kali hanya dianggap sebagai seremoni formalitas. Rasa tidak percaya terhadap proses politik akibat janji-janji yang tidak terealisasi menjadi penghambat partisipasi yang bermakna. Hal ini memaksa KPU untuk tidak hanya menyosialisasikan "cara memilih", tetapi juga membangun kembali "makna memilih" melalui komunikasi dua arah yang lebih empati dan inklusif, sehingga suara masyarakat tetap tersalurkan secara optimal dalam kebijakan publik.

Untuk membedah kompleksitas fenomena multikultural tersebut, penelitian ini menerapkan Teori Akomodasi Komunikasi (Communication Accommodation Theory) dari Howard Giles sebagai kerangka analisis utama. Melalui teori ini, tantangan akses informasi yang tidak merata serta risiko politik identitas diatasi melalui strategi konvergensi, di mana KPU Kabupaten Tangerang secara adaptif menyesuaikan gaya, bahasa, dan medium sosialisasi agar selaras dengan karakteristik sosiokultural audiens. Praktik akomodasi ini dilakukan dengan menggunakan kanal digital dan metode tradisional (tatap muka) guna meminimalisir jarak komunikasi, menjaga akurasi pesan agar tidak memicu distorsi budaya, serta membangun kedekatan emosional dengan kelompok marjinal maupun apatis. Dengan melakukan penyesuaian komunikasi yang tepat, KPU berupaya menciptakan ruang dialog yang inklusif yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perilaku masyarakat dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah penelitian (research gap) yang relevan dengan kajian ini. Pertama, sebagian besar penelitian masih membahas dinamika komunikasi politik dan politik identitas secara makro dalam skala nasional, tanpa menyentuh aspek mikro komunikasi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Kedua, kajian sebelumnya lebih banyak berfokus

pada aspek kerukunan pasca-kontestasi, sementara peran lembaga penyelenggara sebagai aktor komunikasi aktif yang membangun persepsi multikultural di tengah fragmentasi digital masih jarang dikaji. Ketiga, lokus penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada pendidikan pemilih secara umum, bukan pada tantangan spesifik komunikasi multikultural di wilayah dengan karakteristik etnis yang tajam. Keempat, pendekatan yang digunakan selama ini lebih dominan berbasis sosiologis, belum banyak yang mengintegrasikan perspektif manajemen komunikasi dua arah dalam merespons ketegangan antara modernitas digital dan realitas tradisional di tingkat lokal.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan memfokuskan analisis kualitatif pada praktik Teori Akomodasi Komunikasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Tangerang dalam bingkai multikulturalisme. Penelitian ini secara spesifik membedah bagaimana strategi komunikasi digunakan sebagai instrumen strategis untuk memitigasi polarisasi politik identitas sekaligus menekan angka golput di wilayah yang memiliki kontras kesenjangan literasi digital.

Selain itu, kajian ini juga diarahkan untuk mengungkap fenomena apa saja yang muncul terkait komunikasi multikultural dalam proses sosialisasi tersebut, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi di wilayah dengan keragaman etnis dan budaya yang tinggi. Melalui fokus ini, penelitian diharapkan memberikan perspektif baru yang lebih spesifik dan kontekstual dalam memahami proses penyelenggara pemilu menjembatani perbedaan budaya dan akses informasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berparadigma konstruktivis untuk memahami secara mendalam praktik komunikasi multikultural yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2024. Penelitian dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tangerang pada Januari–Juni 2026 dengan subjek penelitian yang dipilih secara purposive, meliputi Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, staf pelaksana sosialisasi, penyelenggara tingkat PPK/PPS, tokoh masyarakat, masyarakat pemilih, aktivis/LSM, serta jurnalis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan kegiatan KPU, peraturan, serta berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijaga menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi teori untuk meningkatkan kredibilitas serta validitas

temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Strategi Komunikasi Multikultural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi multikultural yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang dalam sosialisasi Pemilu Tahun 2024 didominasi oleh bentuk konvergensi komunikasi. Strategi tersebut diwujudkan melalui penyesuaian metode sosialisasi berdasarkan karakteristik wilayah, penggunaan bahasa yang sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai perantara komunikasi, pemanfaatan media komunikasi berdasarkan segmentasi pemilih, serta pendekatan komunikasi interpersonal. Berdasarkan hasil wawancara, KPU membagi wilayah sosialisasi sesuai karakteristik sosial budaya masyarakat. Wilayah tengah lebih banyak menggunakan seminar dan forum resmi, sedangkan wilayah pesisir menggunakan kegiatan berbasis budaya lokal, seperti kegiatan memancing bersama dan aktivitas komunitas. Selain itu, petugas menggunakan bahasa sehari-hari, logat lokal Sunda Tangerang maupun Jaseng (Jawa Serang), serta menyederhanakan istilah teknis kepemiluan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Pada sisi lain, penggunaan bahasa formal tetap dipertahankan ketika menyampaikan informasi administratif dan regulasi kepemiluan sehingga unsur divergensi komunikasi masih ditemukan meskipun dalam intensitas yang terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi multikultural KPU Kabupaten Tangerang lebih banyak merepresentasikan praktik *communication convergence* sebagaimana dijelaskan dalam *Communication Accommodation Theory* (CAT) Howard Giles. Konvergensi terlihat ketika komunikator menyesuaikan bahasa, gaya komunikasi, media, maupun pendekatan sosial agar sesuai dengan karakteristik komunikan sehingga jarak sosial dapat diperkecil dan pesan lebih mudah diterima. Penyesuaian bahasa lokal, penggunaan aktivitas yang dekat dengan budaya masyarakat, serta pendekatan interpersonal merupakan bentuk akomodasi komunikasi yang memperkuat hubungan sosial antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh kemampuan komunikator memahami karakteristik sosial budaya audiens. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memandang sosialisasi pemilu sebagai proses penyampaian informasi secara linear, penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi pemilu berlangsung sebagai proses adaptasi yang dinamis antara penyelenggara dan masyarakat melalui kombinasi konvergensi dan divergensi. Divergensi tetap dipertahankan pada

penggunaan bahasa administratif untuk menjaga akurasi, legalitas, dan netralitas kelembagaan KPU sehingga komunikasi multikultural tidak sepenuhnya menghilangkan identitas institusi.

2) Tanggapan Masyarakat terhadap Komunikasi Multikultural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap komunikasi multikultural yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Tangerang. Masyarakat menilai penggunaan bahasa sehari-hari, logat lokal, media visual, serta pendekatan tatap muka membuat informasi kepiluan lebih mudah dipahami. Kehadiran petugas secara langsung melalui kegiatan door-to-door, pertemuan warga, maupun sosialisasi di lingkungan masyarakat juga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Kelompok pemilih muda menilai penggunaan media sosial seperti TikTok dan Instagram cukup menarik dan sesuai dengan kebiasaan mereka memperoleh informasi. Namun demikian, sebagian masyarakat masih menganggap informasi mengenai administrasi kepiluan, seperti DPT, DPTb, perpindahan memilih, maupun layanan digital masih menggunakan bahasa yang terlalu formal sehingga sulit dipahami. Selain itu, masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses internet lebih mengandalkan komunikasi langsung dan media konvensional dibandingkan media digital.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi konvergensi komunikasi yang dilakukan KPU memperoleh respons positif karena mampu meningkatkan pemahaman dan kedekatan sosial masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Dalam perspektif Communication Accommodation Theory, penggunaan bahasa sederhana, logat lokal, dan komunikasi interpersonal merupakan bentuk linguistic convergence dan behavioral convergence yang mampu meningkatkan penerimaan pesan. Sebaliknya, penggunaan bahasa administratif dan media digital yang belum dapat diakses secara merata menunjukkan adanya partial divergence, yaitu kondisi ketika sebagian bentuk komunikasi tetap mempertahankan karakter formal kelembagaan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi multikultural tidak hanya ditentukan oleh kemampuan komunikator menyesuaikan gaya komunikasi, tetapi juga oleh tingkat literasi, akses teknologi, dan karakteristik sosial masyarakat sebagai penerima pesan. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengukur keberhasilan sosialisasi berdasarkan tingkat partisipasi pemilih, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proses akomodasi komunikasi juga menjadi indikator penting efektivitas komunikasi politik.

3) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang pada Wilayah dengan Keragaman Etnis dan Budaya yang Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2024 di Kabupaten Tangerang menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas komunikasi multikultural. Hambatan tersebut meliputi sikap apatis masyarakat terhadap pemilu, keterbatasan waktu akibat aktivitas ekonomi masyarakat, penggunaan istilah teknis kepiluan yang masih sulit dipahami, perbedaan karakteristik budaya antarwilayah, kesenjangan digital, penyebaran hoaks dan informasi bermuatan SARA, serta keterbatasan sumber daya organisasi berupa anggaran, personel, dan luas wilayah kerja. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh informasi kepiluan secara optimal meskipun KPU telah melakukan berbagai bentuk penyesuaian komunikasi.

Berdasarkan perspektif *Communication Accommodation Theory*, hambatan tersebut menunjukkan bahwa proses konvergensi komunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan komunikator melakukan penyesuaian, tetapi juga oleh kesiapan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi dari komunikan. Sikap apatis masyarakat mencerminkan rendahnya motivasi untuk melakukan konvergensi, sedangkan penggunaan istilah teknis kepiluan menunjukkan masih adanya *linguistic divergence* yang diperlukan untuk menjaga ketepatan regulasi. Kesenjangan digital memperlihatkan bahwa konvergensi berbasis media belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara merata, sementara penyebaran hoaks menjadi gangguan eksternal yang mengurangi efektivitas komunikasi resmi. Dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya mengelompokkan hambatan komunikasi ke dalam aspek teknis dan administratif, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi multikultural jauh lebih kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi antara faktor budaya, ekonomi, teknologi, geografis, dan struktur sosial masyarakat. Temuan tersebut memberikan kontribusi baru bahwa keberhasilan komunikasi politik dalam masyarakat multikultural sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara menyeimbangkan strategi konvergensi dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam, sehingga komunikasi tidak hanya adaptif tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Komunikasi Multikultural Pada Praktik Pemilihan Umum (Studi Kasus Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Pada pemilu Tahun 2024)” yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk komunikasi multikultural yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Tangerang dalam sosialisasi Pemilu Tahun 2024 didominasi oleh strategi konvergensi komunikasi.

Konvergensi tersebut terlihat melalui penyesuaian bahasa yang lebih sederhana, penggunaan logat lokal, segmentasi wilayah berbasis karakteristik sosial budaya, pelibatan tokoh masyarakat sebagai perantara komunikasi, pemilihan media komunikasi yang disesuaikan dengan kelompok pemilih, serta pendekatan interpersonal melalui interaksi langsung di lingkungan masyarakat. Namun demikian, dalam aspek tertentu KPU tetap mempertahankan unsur divergensi, terutama dalam penggunaan istilah formal dan teknis kepemiluan untuk menjaga ketepatan informasi, legitimasi, serta kewibawaan institusi penyelenggara pemilu.

- 2) Tanggapan masyarakat terhadap komunikasi multikultural dalam sosialisasi Pemilu 2024 di Kabupaten Tangerang secara umum bersifat positif.

Masyarakat merasa bahwa informasi lebih mudah dipahami ketika disampaikan dengan bahasa yang sederhana, pendekatan langsung, serta penggunaan media yang sesuai dengan kondisi sosial mereka. Pendekatan tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kedekatan emosional, rasa percaya, serta keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan memahami informasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan istilah teknis dan layanan digital kepemiluan.

- 3) Hambatan dalam pelaksanaan komunikasi multikultural pada sosialisasi Pemilu 2024 di Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu masih adanya sikap apatis masyarakat terhadap pemilu, keterbatasan waktu akibat beban pekerjaan, perbedaan karakteristik budaya antarwilayah, kesenjangan literasi dan akses digital, kompleksitas istilah teknis kepemiluan, serta penyebaran informasi yang tidak valid (hoaks). Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi belum sepenuhnya berjalan secara merata dan inklusif, sehingga masih diperlukan penyesuaian strategi komunikasi yang lebih berkelanjutan dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam.

REFERENSI

- Adnyana, P. E. S., Damanik, F. H. S., Aswadi Jaya, Imronudin Imronudin, A. H., Pipit Utami, E. I., & Fatmawati, F. (2025). Pendidikan Multikultural. StarDigital Publishing. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UL5aEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA75&dq=info:Rg3lkKnMPa8J:scholar.google.com&ots=K3ngJ7dGAw&sig=H1D-lxsKtrVKdFxoVVCIJMl56zc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Adrianus Aman, P. P. (2023). Multikulturalitas dan Narasi Primordial dalam Politik Elektoral Indonesia. Jurnal Unwira, 14(1), 53–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v14i2.2308>

- Ardian, M. G. (2024). The Analysis of KPU Karawang Strategy in Building Political Culture through Voter Education. *International Conference on Education, Language, Literacies, and Literary Studies*, 01(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.63011/pnp.v1i2.3>
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (Vol. 251).
- Arrianie, L. (2023). *Komunikasi Politik*. PT RajaGrafindo Persada. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EOHeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Lely+Arrianie.+&ots=TL8Km8CLw5&sig=V4OcJYtflNOBJdH7PDbbFR0Clh8&redir_esc=y#v=onepage&q=Lely+Arrianie.+&f=false
- Atmaja, K. (2022). *Paradigma Sosiologi Perspektif Kesatuan Ilmu*. CV Lawwana. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SC-gEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Atmaja,+K.+&ots=1WuyvzNpEv&sig=1dtBAPgWXZoaQFg0OCKhMz4K0q8&redir_esc=y#v=onepage&q=Atmaja%2C+K.+&f=false
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). *Pengumpulan Data Penelitian*. 3(5), 5423–5443.
- Grunig, J. (2013). Keunggulan dalam Hubungan Masyarakat dan Manajemen Komunikasi. In *Sistem Simestris Komunikasi Internal*. (pp. 531–575).
- Gunawan, A. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024*. 2024.
- Hafizah, N., P, T. C. P., & Sari, M. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan. 586–596.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jejak. <https://books.google.co.id/books?id=7RwREAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Hasanuddin, H. (2024). Konsep Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia. 9(1), 31–43.
- Jailani, M. S. (2023). (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 1–9.
- Kartiko, A. (2025). *Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence - LED Policing pada Pemilu 2014 & 2019)*. USK Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=S7trEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kartiko,+A.+&ots=NH-IOW1CAq&sig=YFIFvnFHgVAi7O4ejh5iYfrD-v0&redir_esc=y#v=onepage&q=Kartiko%2C+A.+&f=false
- (2025). *Intelijen Keamanan Dan Politik Identitas%3A Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing Pada Pemilu 2014 Dan 2019)*. Usk Press.&f=false
- Loso Judijanto, Atmaja, U., Irawati, I., Juhandy, D., Kusumastuti, S. Y., & Nuraini, C. (2025). *Ekonomi Pembangunan Desa*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gwBjEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=Ekonomi+Pembangunan+Pedesaan.+&ots=20T9nN8HhR&sig=vh3EN3y8lM0IDqv8qNp8haz1Qp8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Mamis, S., Kristin E.J Nomleni, S. D. P., Judijanto, L., & Irawatie, A. (2025). *Komunikasi dalam Perspektif Sosial Budaya*. PT. Green Pustaka Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XO90EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=+Komunikasi+dalam+Perspektif+Sosial+Budaya.&ots=NxpNULZu5C&sig=4YMTv8q9MvRUNL4AL8Bjc2zcySU&redir_esc=y#v=onepage&q=Komunikasi+dalam+Perspektif+Sosial+Budaya.&f=false
- Melsya Firtikasari, D. A. (2024). *Pendidikan Multikultural*.
- Munandar, A., & Susanti, E. (2025). Politik Identitas Dalam Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Politik Sosial di Indonesia). *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 1–14. <https://ejournal.lli.or.id/index.php/JIPSH/article/view/20/14>

- Nasrullah, R. (2020). MEDIA SOSIAL (PERSPEKTIF KOMUNIKASI, BUDAYA, DAN SOSIOTEKNOLOGI).
- Nurhidayah, S., Rahmawati, A., Saputra, D. S., Majalengka, U., Majalengka, U., & Majalengka, U. (2022). Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal. 1(1), 33–39.
- Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Gurning, E. S. N. K., Situmorang, R. F. R., Sipayung, T. P. D., Sesilia, A. P., Purba, P. P. R. B., Chaerul, M., Siagian, I. Y. V., & Rantung, G. A. J. (2021). Metode Penelitian Ilmiah. Yayasan Kita Menulis.
- Pangastuti, F., Utari, P., & Satyawan, A. (2021). Negosiasi Integrasi Informasi Perempuan dalam Memilih Pemimpin (Studi Kasus Integrasi Informasi Muslimat NU dalam Memilih Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur di Magetan). 8(3), 131–158.
- Ramadhan, I., Zatalini, A., & Imran, I. (2024). The Nyekelan Tanah Tradition: An Analysis of Multicultural Values in the Dayak Kantuk Kapuas Hulu Community. *International Conference on Character and Sustainable Education (ICoCSE) Proceedings*, 1, 262–272.
- Ratnaningtyas, E., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B., Aminy, M., Saputra, N., & Jahja, A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Salahuddin. (2024). Komunikasi Dalam Organisasi Multikultural. In *Komunikasi Sosial dan Lintas Budaya* (pp. 48–58). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JsEpEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=RA1-PA2&dq=Salahuddin,+S.+P.+\(2024\).+Komunikasi+Dalam+Organisasi+Multikultural.+Komunikasi+Sosial+Dan+Lintas+Budaya,+2\(1\),+45-58.&ots=tgbcSuj7N&sig=dsSZO6bw7oYu34P9dhaQ-9xuYZo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JsEpEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=RA1-PA2&dq=Salahuddin,+S.+P.+(2024).+Komunikasi+Dalam+Organisasi+Multikultural.+Komunikasi+Sosial+Dan+Lintas+Budaya,+2(1),+45-58.&ots=tgbcSuj7N&sig=dsSZO6bw7oYu34P9dhaQ-9xuYZo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Samosir, H. E. (2023). Multicultural Political Communication (Case Study of Political Communication Bulan Bintang Party in North Sumatra Province). *International Jurnal Islamic Education, Research and Multiculturalism*, 23–48.
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Abdullah, R. (2023). Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 10–16. <https://doi.org/doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Sarihati, T., Luthfie, M., & Budi Kurniadi. (2019). Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik. Rajawali Printing. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KbOAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Tati+Sarihati,+Muhammad+Luthfie,+B.+K.+\(2022\).+Komunikasi+Politik,+Media+Massa+dan+Opini+Publik.&ots=I3i31Gn8aq&sig=L5pIMTwMx1KetEMvEpPQHIZPkFg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KbOAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Tati+Sarihati,+Muhammad+Luthfie,+B.+K.+(2022).+Komunikasi+Politik,+Media+Massa+dan+Opini+Publik.&ots=I3i31Gn8aq&sig=L5pIMTwMx1KetEMvEpPQHIZPkFg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif.
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D. CV Saba Jaya Publisher.
- Surokim, Rakhmawati, Y., Muhtar, C. S., Handaka, T., Dartiningsih, B. E., Juliyanti, D. M., Rachmawati, F. N., Kurniasari, N. D., Nikmah, D. T., Suryandari, N., Quraisyin, D., Bambang, Rachmad, T. H., & Fakhrur, S. A. (2016). Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi.
- Syahrin, A. Al., Noviani, F., Nur, I., & Idris, M. (2023). Kerukunan Masyarakat Multikultural Pasca Kontestasi Politik Identitas Saat Pilkada Gubernur Kalimantan Barat. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 22(1).
- Tangerang, K. P. U. K. (2024). Komisi Pemilihan Umum. In <https://kab-tangerang.kpu.go.id/>.
- Undari, S., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tersier. *Jurnal Edu Reseach*, 5(September), 110–116.
- Wahyudi, A. R., & Yuswanto, F. (n.d.). Moderasi Beragama dalam Dinamika Kampanye Pilkada : Upaya Mereduksi Polarisasi melalui Pendekatan Multikultural.
- Wibowo, A. E. (2021). Metodologi Penelitian yang diajarkan untuk Menulis Karya Ilmiah.

- Wijanarka, T., Yanuartha, R. A., Sari, D. K., & Alvianto, B. (2025). Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2024. *Jurnal Neo Societal*, 6(4), 210–227.
- Yin, R. K. (2023). *STUDI KASUS (DESAIN DAN METODE)*. <https://books.google.co.id/books?id=FBXAEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Zebua, A. D., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2022). Pengaruh Politik Multikultural pada Jabatan Struktural Multicultural Political Effect on Structural Government Positions in North Nias District. *Perspektif*, 11(3), 1194–1208. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6615>